

# PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

**Ahmad Zohdi**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram  
E-mail: ahmadzohdi979@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

*Di sisi lain, konsep pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembangunan dalam sektor pendidikan merupakan aspek dari pembangunan politik bangsa, yang tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dengan blue print pembangunan bangsa. Arah tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan nasional mencakup tiga hal yaitu masyarakat industri modern, ideologi pembangunan dan politik pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat industri maka ada empat unsur dalam politik pendidikan di Indonesia yaitu; (1) pendidikan harus berkualitas, (2) pendidikan perlu menyiapkan tenaga yang terampil, (3) pendidikan merupakan landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif, dan (4) pelaksanaan pendidikan perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional.*

**Kata Kunci:** *Partai politik Islam, pendidikan Islam, pendidikan nasional.*

## A. PENDAHULUAN

Secara politis, bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila, maka semua aliran atau partai berdasarkan agama tertentu, termasuk agama Islam tetap tunduk dan patuh pada ideologi negara yang sudah disepakati oleh *the founding father* pada tahun 1945. Islam yang memiliki kaya konsep dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk pendidikan harus menyesuaikan diri dengan ideologi yang hidup dalam negara dan bangsa dimana aturan itu berlaku. Umat Islam sadar bahwa untuk menyatukan berbagai macam agama, bahasa, budaya, suku, daerah dan sebagainya maka Pancasila menjadi perekat kepentingan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Artinya dalam menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat, Pancasila sebagai ideologi negara cukup ampuh untuk dijadikan alat pemersatu bangsa tetapi bukan dijadikan sumber dari segala sumber hukum dalam beragama. Karena itu ketika para pendiri bangsa ini bersidang pada BPUKPI tanggal 18 Agustus 1945 merancang dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara semata untuk dijadikan simbol (maskot) bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan para tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Wahid Hasjim tidak kaku dan tidak memaksa Islam wajib atau harus menjadi ideologi negara. Para pendiri bangsa umumnya sudah berpikiran jauh ke depan bahwa apabila pada sidang BPUPKI itu sama-sama mempertahankan ideologi agama masing-masing, maka negara bernama Indonesia itu belum bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi mereka masih berdebat panjang dahulu hingga penjajah akan kembali menguasai kerajaan-kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara. Dalam hal ini kita bersyukur bahwa Pancasila menjadi *rahmatan lil alamin* dan menjadi inspirator dalam menyejukkan suasana dan keinginan memisahkan diri dari koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

Prolog dan realitas sejarah di atas mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Pancasila tetap dijadikan ideologi negara tetapi ia tidak memiliki konsep-konsep teoritis tentang bagaimana menapak kemajuan suatu masyarakat dalam segala

bidang termasuk bidang pendidikan lebih-lebih pendidikan Islam. Konsep-konsep itu mutlak lahir dari para pemikir dan intelektual yang memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Sistem Pendidikan Nasional: Politis-Elitis**

Para tokoh pendidikan nasional Indonesia umumnya berpandangan sama bahwa dalam rangka mengantisipasi kemajuan bidang industri di era milenium III politik ideologi bangsa Indonesia harus diarahkan pada tercapainya masyarakat industri modern. Karena itu dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang SISDIKNAS<sup>1</sup> merumuskan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 2). Kemudian pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3). Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.(Pasal 4).

Rumusan di atas sangat gamblang dan sistematik dan merupakan kerangka acuan politik pendidikan nasional dalam semua rumusan aspek kebijakannya. Rumusan tersebut merupakan penjabaran dari politik ideologi nasional ke dalam sektor pendidikan. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor pendidikan adalah aspek dari pembangunan politik bangsa, yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).

tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dengan *blue print* pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena itu, tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan nasional mencakup tiga hal yaitu masyarakat industri modern, ideologi pembangunan dan politik pendidikan. Namun demikian, politik pendidikan harus menunjang masyarakat industri modern yang merupakan cita-cita bangsa untuk tetap eksis di tengah kemajuan industri negara-negara berkembang dan maju. Lebih jauh Tilaar<sup>2</sup> membahas ada empat unsur dalam politik pendidikan di Indonesia yaitu; (1) pendidikan harus berkualitas, (2) pendidikan perlu menyiapkan tenaga yang banyak dan terampil, (3) pendidikan merupakan landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif, dan (4) pelaksanaan pendidikan perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional.

Berpijak dari politik pendidikan nasional di atas, tampaknya pendidikan di Indonesia masih tetap kuat didominasi oleh pemikiran nasionalis sekuler baik disuarakan oleh pakar pendidikan non Islam maupun segelintir pakar pendidikan Islam berhaluan sekuler. Para pakar kedua jenis ini menempati posisi elitisme di jajaran Departemen Pendidikan Nasional dan Agama serta didukung lembaga-lembaga pendidikan non Islam. Sementara para pakar pendidikan Islam belum mampu menerobos dalam dua tahapan yaitu tahap pertama memiliki konsep yang jelas dan dapat diterima secara logis dan politis dan kedua memiliki pakar atau tokoh-tokoh Islam yang duduk dalam penentuan rancangan dan legitimasi pendidikan nasional. Tahap pertama sampai hari ini belum ada pakar pendidikan Islam berkaliber nasional yang memiliki konsep pendidikan Islam yang kemudian dapat dijadikan rujukan bagi pendidikan di lembaga-lembaga Islam di bawah naungan Departemen Agama serta lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sekarang, baru ada justeru tahap kedua yaitu mampu menempatkan tokoh-

---

<sup>2</sup>H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Rosdakarya, 1999), hal. 163-4.

tokoh Islam atau pakar seperti A.Malik Fadjar tetapi ia tidak mampu memberikan sumbangan dominan bagi konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Keadan di atas diperparah lagi oleh hasil sistem pendidikan nasional kita yang kurang bermoral bagi generasi muda sebagai hasil didikan generasi tua. Menurut Tilaar dikutip Azizy<sup>3</sup> ada tiga kelemahan sistem pendidikan nasional yaitu (1) bersifat kaku dan masih sentralistik tercermin dari bentuk ujian nasional dan kurikulum berbasis kompetensi yang sifatnya uniformitas, (2) tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat, seperti memberlakukan pemakaian rok pendek pada siswa SD sampai SMU beragama Islam padahal agama mereka mewajibkan tutup aurat, dan juga melihat sebelah mata keberhasilan pondok pesantren yang telah memberikan sumbangan nyata bagi pembentukan anak bangsa yang mayoritas di negeri ini, dan (3) tidak adanya pemberdayaan masyarakat bahkan pembodohan masyarakat dengan semakin suburnya praktek KKN dalam birokrasi pemerintah yang kaku yang kerap dijadikan alat politik kekuasaan. Lebih jauh, Azizy<sup>4</sup> menambahkan tiga aspek kelemahan sistem pendidikan nasional yaitu; (1) terbelenggunya guru dan dijadikan guru sebagai bagian dari alat birokrasi yang merupakan alat politik penguasa yang mencengkramkan kukunya kepada guru, (2) pendidikan tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih proses pengisian otak (kognitif) pada anak didik. *Eduacting for characters* tidak pernah menjadi wacana apalagi pelaksanaan dalam sistem pendidikan nasional, dan (3) anak tidak pernah dididik untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu (*curiosity*). Selama ini pengajaran pendidikan agama lebih ditekankan pada penguasaan materi melalui hafalan dan anak tidak pernah diberi peluang berpikir dan berinovasi sendiri apalagi menemukan sesuatu yang baru (*discovery*). Padahal teori belajar mengatakan bahwa pendidikan

---

<sup>3</sup>A. Qadri Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidika Anak Sukses Masa Depan Pandai dan Bermanfaat)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hal. 8-9

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 12.

yang baik adalah memberikan kesempatan dan pengalaman anak pada *the joy of discovery* (indahnyanya penemuan baru), termasuk dalam belajar agama. Ini berarti peran guru dalam membelajarkan anak perlu dikedepankan kebebasan anak mengungkap nalar dan inovasi mereka menemukan sesuatu yang baru dalam pembelajarannya.

Mengacu pada substansi pendidikan nasional, tampaknya pendidikan nasional lebih bernuansa politis di tingkat elit daripada mengakar ke bawah (*bottom-up*) yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara umum (*grass-root*) sebagai landasan utama substansi pendidikan nasional. Substansi pendidikan nasional juga banyak diukur dengan kepentingan berbagai pihak yang lebih luas tetapi juga mengorbankan kepentingan yang lebih besar, akibatnya hasil pendidikan nasional tetap bernilai politis dan elitis. Pendidikan Islam yang merupakan sebuah sistem yang universal menjadi sangat kecil aksesnya untuk mewarnai sistem pendidikan nasional yang bersifat lokal. Padahal ia bisa diterapkan untuk memberikan corak khas bagi identitas komunitasnya sendiri, maka sangat lucu dan aneh, umat Islam yang memiliki sistem pendidikan yang universal tidak bisa dijadikan landasan filosofis dan teoritis bagi umatnya di negeri ini. Pendidikan Islam hendak berbuat lebih banyak mengantarkan umatnya untuk memahami ajaran agama dengan benar dan mempraktekkan dengan benar pula. Namun niatan baik itu berharap pada bergulirnya desentralisasi pendidikan, di mana daerah diberi wewenang lebih luas untuk menentukan corak pendidikannya, tetapi kalau daerah masih memperpanjang cara-cara pusat memperlakukan kebijakan pendidikan yang kaku, tetap uniformitas, dan birokratis maka akan terjadi politisasi pendidikan dalam koridor daerah masing-masing. Kalau hal ini akan terjadi maka standar minimal berlaku secara sentralistik tetap diberlakukan secara nasional oleh pemerintah pusat. Untuk menghindari sistem pendidikan nasional bersifat politis dan elitisme, Azizy<sup>5</sup> menyarankan sistem pendidikan nasional kita; (1) tidak kaku

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 14.

dan tidak selalu unifomitas, (2) menghargai pluralitas potensi kedaerahan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, (3) bebas KKN, (4) menempatkan guru sebagai pendidikan bukan alat birokrasi politik, (5) menekankan pada kepribadian keseharian dan menekankan pada sikap kritis, kreatif dan inovatif bagi anak didik. Diharapkan adanya perubahan kebijakan dapat menggugah para pengambil kebijakan bidang pendidikan untuk lebih berorientasi pada kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat demi memenuhi kepetingan orang banyak sesuai kontribusi yang diberikannya, dan bukan memaksa kehendak dengan mewujudkan sistem pendidikan nasional dalam konteks politik yang penuh penjejalan dan apriori.

Di sisi lain menurut pengamatan Mastuhu dikutip Kasiram<sup>6</sup> bahwa ada sejumlah problem mendasar yang harus segera diatasi dalam pendidikan nasional kita yaitu; adanya dualisme sistem pendidikan yang pada gilirannya menghasilkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, sistem pendidikan kita baik jalur pendidikan agama maupun umum terlalu menekan pada pelatihan ketimbang pendidikan, mementingkan materi ketimbang metodologi, mementingkan produk final ketimbang proses, mengutamakan pemikiran reaktif ketimbang proaktif. Berbagai problem dialami sistem pendidikan nasional mencerminkan bahwa pendidikan nasional kurang mampu mengakses kepentingan pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional harus banyak introspeksi diri sebab pendidikan nasional terlalu bersemangat memikul beban berat di pundaknya padahal ia memang tidak kuat memikulnya. Buktinya kegagalan demi kegagalan output pendidikan yang dihasilkan tidak akan memuaskan masyarakat sebab antara landasan teori pendidikan dengan praktek tidak sinkron, demikian juga konsep filosofisnya, pendidikan Islam bersifat universal tetapi pendidikan nasional filosofisnya bersifat lokal (Pancasila). Demikian juga landasan teori pendidikan

---

<sup>6</sup>Mudjia Rahardjo, (editor), *Qua Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pengetahuan* (Malang: Cendekia Paramulya, 2000), hal. 54.

Islam bersumber dari Qur'an dan Hadits tetapi pendidikan nasional bersumber dari teori-teori pendidikan lokal seperti gagasan Ki Hajar Dewantara dan mengadopsi teori-teori pendidikan Barat yang belum tentu cocok dengan pendidikan nasional yang peserta didiknya didominasi anak-anak Muslim. Ini berarti, sistem pendidikan nasional tetap mengusung kepentingan politis-elitis dan terus menciptakan dikotomi dualisme sistem nasionalis dan Islam yang kemudian melahirkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, baik dalam penguasaan agama maupun umum. Adanya dua dualisme sistem pendidikan, nampaknya pendidikan nasional kita terus menerus dijadikan kelinci percobaan. Menurut Winarno Surakhmad<sup>7</sup> tindakan percobaan berbagai sistem pendidikan nasional mengandung resiko bagi anak bangsa dan kebijakan Pemerintah tentang pendidikan tidak konsisten dan terkesan parsial. Ia mencontohkan pemberlakuan otonomi daerah berpengaruh pada semakin banyaknya permasalahan pendidikan, bahkan ia menilai pada era otonomi justru kualitas pendidikan mengalami penurunan tajam. Hasil yang tidak memuaskan seperti ini sudah diingatkan oleh mantan pendiri republik ini, Moh. Hatta<sup>8</sup> mengatakan dalam konteks Indonesia, Islam tetap menjadi tiang bangsa dan dalam membangun masyarakat tidak mungkin tanpa melibatkan Islam. Untuk itu Islam harus dipahami secara komprehensif namun sayang proporsi pendidikan Islam dalam konteks politik pendidikan nasional kontribusinya sangat kecil maka tidak heran pemahaman Islam yang diperoleh peserta didik tampak eksklusif sebab materi dan alokasi waktu pengajaran dan pendidikan Islam sangat terbatas. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional belum menemukan jati diri yang sesuai kepribadian bangsa dan terus mencari bentuk yang bisa diterima secara politis dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup>Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Senantiasa Jadi Kelinci Percobaan*, NTB Post, 30 September 2003, hal. 12.

<sup>8</sup>Fuad Jabali dan Jamhari (Penyunting), *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2002), hal. 7.



## **Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Ritual**

Dilihat dari substansi pendidikan Islam mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umumnya berkisar tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan. Tetapi dalam pengertian dikemukakan Athiyah al-Abrasyi bahwa pendidikan Islam mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna, bahagia, cinta tanah air, sehat jasmani, sempurna budi pekerti, teratur pikiran, halus perasaan, manis tutur kata baik lisan maupun tulisan.<sup>9</sup> Lebih jauh, Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian menurut ukuran-ukuran Islam.<sup>10</sup> Dua pengertian tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan proses pembentukan akhlak peserta didik sesuai ajaran agamanya.

Untuk mewujudkan pembentukan akhlak peserta didik maka ia harus diajarkan mata pelajaran fikih, ibadah, akhlak, tasawuf, tafsir, hadits dan sebagainya. Namun kenyataannya di sekolah agama di bawah naungan Departemen Agama tidak diajarkan semua komponen pelajaran untuk melahirkan seorang peserta didik yang memahami Islam dengan utuh, apalagi pemerintah sudah menetapkan porsi pendidikan agama hanya 30% selebihnya pendidikan umum. Lebih parah sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional pendidikan agama diberikan 5%. Namun anehnya kedua output pendidikan dua departemen tersebut hasilnya sama-sama kurang memuaskan, terbukti banyaknya kasus kenakalan remaja dalam berbagai bentuk hampir ada seluruh Indonesia. Keadaan ini banyak pihak menyalahkan hasil pendidikan Islam. Namun kalau diteliti akar permasalahannya cukup banyak dan beragam, antara lain karena siswa banyak dijejali dengan tataran kognitif, jam pelajaran agama di sekolah umum terlalu sedikit, materi kurikulum pendidikan Islam kurang praktis. Adanya berbagai

---

<sup>9</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hal. 4.

<sup>10</sup>*Ibid.*

kritikan dan saran dari output pendidikan Islam, banyak pendapat memberikan ulasannya, antara lain Imam Suprayogo menyebut bahwa seseorang dikategorikan berislam dengan baik manakala yang bersangkutan telah melakukan aktivitas ritual seperti shalat, zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji, padahal aktivitas ritual itu baru akan bermakna dalam kehidupan berislam yang sesungguhnya jika mampu melahirkan amal (kepedulian sosial yang memadai).<sup>11</sup> Untuk melahirkan kepedulian sosial, Suprayogo menawarkan alternatif perlunya peserta didik membekali diri dengan ilmu politik, ekonomi, budaya, sosiologi dan ilmu-ilmu lain agar dalam memahami Islam lebih komprehensif dan utuh. Namun ia mengakui bahwa pendidikan Islam baik dalam arti kelembagaan maupun substansinya masih memberikan prioritas utama pengembangan ritual sehingga ukuran keberhasilan peserta didik dalam pendidikan seolah-olah ukurannya hanya memahami ihwal pelaksanaan ritual Islam<sup>12</sup>. Ia berharap pendidikan Islam ke depan bukan dominasi pengajaran ahkirat (ritual) tetapi juga diseimbangkan dengan pengajaran ilmu-ilmu dunia. Harapan Suprayogo tersebut juga sudah diisyaratkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah: 31-32 yang artinya:

*“Dan mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Malaikat lalu berfirman; sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu mamnag orang-orang yang benar. Mereka menjawab “Maha suci Engkau, kami tidak tahu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami...”*<sup>13</sup>

Ayat ini memberikan isyarat kepada Adam dan anak cucunya untuk memahami benda-benda sekitarnya sekaligus pemanfaatannya baik dirinya maupun orang lain dan

---

<sup>11</sup>Imam Suprayogo, *Reformulasi Visi Pendidikan Islam* (Malang: STAIN Press, 1999), hal. 67.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 68.

<sup>13</sup>Q.S. Al-Baqarah:31-32).

lingkungannya. Dalam kesempatan ini Nabi Adam as diberi pelajaran tentang ilmu-ilmu duniawi. Lain halnya ketika Nabi Adam ketika berada di surga, ia banyak belajar bagaimana ia harus selalu taat pada perintah Allah, namun ia tergoda rayuan Iblis karena melanggar larangan Allah. Artinya ia banyak belajar tentang pengendalian diri, iman yang kokoh dan senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan demikian sesungguhnya pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang selalu memberikan ilmu-ilmu secara seimbang yaitu ilmu-ilmu untuk mencari rezeki halal di dunia serta ilmu-ilmu untuk persiapan di akhirat. Perintah untuk menuntut ilmu dalam dua dimensi tertera dalam firman Allah menegaskan “Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi<sup>14</sup>.

Dengan demikian substansi pendidikan Islam di Indonesia selama ini adalah pendidikan yang mengedepankan pemahaman ritual keagamaan melalui hafalan-hafalan. Padahal pendidikan agama bukan sekedar dihafal tetapi yang lebih penting dan bermakna adalah ketrampilan anak didik dalam mempraktekkan ajaran agama yang dinutnya.

### **Pendidikan Islam Mengutamakan Operasionalisasi**

Salah satu pemicu munculnya krisis multidimensional (baca; krisis kepercayaan dan krisis moral) di Indonesia pasca orde baru antara lain kesalahan politik dan pendidikan termasuk pendidikan Islam. Menurut A. Qadri Azizy<sup>15</sup>, penilaian kritis terhadap pendidikan Islam karena; (1) Islam diajarkan lebih banyak hafalan padahal nilai-nilai Islam harus dipraktekkan, (2) pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya, (3) penalaran dan argumentasi berpikir masalah keagamaan kurang mendapat perhatian, (4) penghayatan nilai-nilai agama kurang ada penekanan, (5)

---

<sup>14</sup>Q.S. 28 : 77.

<sup>15</sup>A. Qadri Azizy, *Pendidikan...*, hal. 62.

metode pengajaran agama khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Islam kurang mendapat penggarapan, (6) ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalitas (termasuk verbalistis), dan (7) pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter anak didik dalam perilaku keseharian.

Berbagai permasalahan dialami pendidikan Islam perlu dikaji ulang dasar-dasar pendidikan Islam seperti; Qur'an, Hadits, sikap dan perbuatan para sahabat, dan Ijtihad.<sup>16</sup> Adanya cara-cara pembelajaran Islam yang keliru melahirkan pemahaman Islam yang keliru pula bahkan menjurus pada timbulnya sikap anarkis yang berlebihan. Padahal Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah sepenuhnya berisi petunjuk kepada manusia tentang kehidupan yang baik dan menghindari perbuatan yang jtercela. Dan pendidikan Islam misinya semata-mata mengimplementasikan wahyu Allah dalam memberi petunjuk (hudan) kepada umat manusia. Sedangkan misi utama Rasulullah SAW adalah mewujudkan akhlak mulia umat manusia. Dengan demikian masalah pokok pendidikan Islam adalah hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horisontal dengan sesama manusia. Namun sayang selama ini, materi pendidikan Islam banyak mengulas hubungan vertikal dengan Allah sementara materi berkaitan dengan sesama manusia kurang bahkan materinya terkesan formalitas dan verbalistik meminjam istilah A. Qadri Azizy. Dikatakan formalitas karena pendidikan Islam lebih banyak diajarkan dengan cara-cara hafalan, seperti; mendikte, belajar diktat, tanya jawab dan evaluasinya bersifat tertulis. Disebut verbalistik karena mengajarkan Islam tidak mendalam, kurang menyentuh pada hakikat nilai-nilai ibadah dan gerakan yang dilakukannya. Dalam tataran ini, peserta didik baru pada tahap penerima informasi dan informasi yang diterima pun bersifat umum (verbal) karena belum menyentuh pada nilai-nilai Islam yang hakiki dan pola sajian pendidikan Islam sifatnya indoktrinasi. Pendidikan Islam seharusnya bukan sekedar menghafal beberapa dalil agama atau beberapa syarat-rukun ibadah,

---

<sup>16</sup>Ramayulis, *Ilmu...*, hal. 13-18.

namun lebih diutamakan proses untuk mendidik murid memahami dan menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kesehariannya. Ini berarti, proporsi materi pendidikan Islam seharusnya lebih banyak berkaitan dengan praktek (operasionalisasi). Dengan demikian, pendidikan Islam yang diajarkan secara formal di sekolah terdapat ada dua kajian, yaitu; mendidik siswa/siswi untuk berperilaku sesuai nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa/siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam. Kajian pertama dan kedua dapat diterapkan siswa yang ada di madrasah karena materi pelajaran Islam lebih banyak dan terfokus, sedangkan kajian kedua dapat diperoleh siswa pada sekolah umum dan harapan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Islam rendah sebab materi yang mereka terima sedikit dan serta bersifat teoritis-verbalistik.

Bagi siswa yang menempuh pendidikan umum, untuk mengejar ketertinggalan pemahaman Islam yang lebih baik seperti pada siswa madrasah atau pondok pesantren, sekolah umum mutlak menambah jam pelajaran melalui muatan lokal. Proptenas 2000-2004 (UU No. 25 tahun 2000) menyebut pendidikan agama di sekolah umum (TK, SD, SLTP, dan SMU) bertekad meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia. Penambahan jam pelajaran agama perminggu diharapkan proses pendidikan agama dapat menyentuh pada masalah-masalah praktis sehingga pemahaman Islam lebih kuat dan mendalam. Untuk itu, menurut A. Qadri Azizy<sup>17</sup> ada empat sasaran pokok pendidikan agama Islam pada sekolah umum yaitu; (1) pendidikan Islam hendaknya mampu mengajarkan aqidah siswa sebagai landasan keberagamaannya, karena itu dalam pasal 12 UU Sisdiknas yang baru menekankan guru harus yang mengajarkan agama harus seagama dengan agama siswa, (2) pendidikan agama mengajarkan siswa pengetahuan ajaran agama, tetapi evaluasinya harus melibatkan praktek sehari-hari, (3) pendidikan agama harus mengajarkan agama sebagai landasan bagi semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, artinya agama harus menjadi landasan

---

<sup>17</sup>A. Qadri Azizy, *Pendidikan...*, hal. 74.

moralitas bangsa dan mampu menjadi hudan (petunjuk) dan cahaya bagi siswa dalam membedakan mana yang benar dan salah, (dan (4) pendidikan agama yang diberikan kepada siswa harus menjadi landaan moral kehidupan sehari-hari. Untuk efektifitas pencapaian tujuan akhir pembelajaran pendidikan agama Islam, dua saran diajukan ahli pendidikan Barat dikutip Azizy<sup>18</sup> "do not teach too many subject dan what you teach, teach thoroughly" (jangan mengajarkan kepada murid terlalu banyak materi dan materi yang diajarkan, hendaknya secara mendalam/mendetail).

Demikian juga sistem penilaiannya, tidak cukup dengan evaluasi formatif dan sumatif tetapi harus ditambah dengan ujian praktek. Artinya sistem penilaian dalam pendidikan Islam memiliki tiga komponen utama dan berbeda dengan mata pelajaran lain sebab pendidikan agama memerlukan pemahaman riil dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itu ketika si A yang memiliki nilai 10 tetapi kalau ketika tes formatif sehari-hari di sekolah suka berbicara jorok, berbohong, memakai obat-obat terlarang, dan sebagainya maka nilainya bisa menjadi 0 ditambah lagi dengan praktek sholat tidak bisa dilakukan dengan sempurna dan ia hanya bisa memperoleh nilai 5, maka kalau dijumlahkan nilainya menjadi 15 kemudian dibagi tiga hasilnya 5, maka itulah nilai akhirnya. Adanya penilaian yang proporsional dan adil terhadap pendidikan agama dapat membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik yang pada gilirannya terbangun masyarakat yang beretika sosial yang baik dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sistem penilaian pendidikan agama Islam perlu mendapat perhatian serius khususnya pihak Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional agar siswa betul-betul mendapat pemahaman Islam yang betul-betul kuat dan mendalam sebagai bekal mereka hidup di tengah arus informasi dan pengaruh globalisasi sekuler.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 65.

### Marginalisasi Pendidikan Islam

Keahlian para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia belum banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan baik umum maupun agama, maka tidak heran konsep pendidikan Islam yang bisa disumbangkan kepada undang-undang sistem pendidikan nasional sangat minim dan tidak mampu memberikan nilai tambah yang signifikan kecuali hanya sebagai suplemen (tambahan) apalagi sebagai penyeimbang. Mengapa terjadi demikian, jawabannya antara lain karena para tokoh-tokoh Islam tidak memiliki kepakaran yang memadai dalam bidang pendidikan Islam, meskipun ada tetapi mungkin ia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pembahasan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional atau karena mereka kalah dalam perdebatan tentang sistem konsep pendidikan yang baik dan *sustainable* sehingga sampai hari ini konsep pendidikan Islam tetap menempati posisi marginal dalam bingkai sistem pendidikan nasional di Indonesia. Para ulama dan cendekiawan Muslim kurang *concern* pada konsep-konsep pendidikan Islam sebab mereka lebih terfokus pada kajian ilmu-ilmu keislaman seperti; tafsir, hadits, syariat, masalah-masalah sosio kultural, kegiatan-kegiatan ritual dan serimonial keagamaan. Para tokoh-tokoh Islam kaliber nasional kurang banyak menjadi ahli di bidang pendidikan baik pendidikan umum maupun agama, apalagi cabang-cabang ilmu pendidikan Islam seperti; kurikulum pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam dan pembelajaran pendidikan Islam. Bahkan kedua tokoh keagamaan NU dan Muhammadiyah seperti Gus Dur dan Amin Rais memiliki perbedaan yang sangat tajam masalah pendidikan di Indonesia. Menurut Gus Dur bahwa model budaya pendidikan yang baik adalah pesantren tradisional, sedangkan Amin Rais menyebut harus mengikuti pendidikan modern.<sup>19</sup> Ini menunjukkan bahwa kedua pemimpin nasional itu tidak memiliki konsep yang jelas tentang pendidikan. Padahal dari

---

<sup>19</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hal. 185.

segi penguasaan ilmu-ilmu keislaman kedua tokoh keagamaan papan atas ini tidak diragukan lagi tetapi keduanya tidak pernah memiliki konsep pendidikan Islam atau menyusun bersama-sama konsep pendidikan Islam sebagai rujukan pendidikan nasional di Indonesia. Keduanya lebih tertarik pada masalah-masalah politik dan demokratisasi.

Hal lain yang memicu semakin terpinggirkannya pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional karena pendidikan Islam lebih banyak menuntut pelajaran bersifat pemahaman ritual sebagai persiapan akhirat sementara pelajaran untuk persiapan kehidupan di dunia kurang. Padahal sistem pendidikan nasional menghendaki peserta didik lebih siap dalam kompetensi kehidupan dunia yang ditandai dengan barang-barang industri dan teknologi. Faktor visi dan misi yang berbeda ini belum dapat dipadukan dalam sebuah sistem pendidikan yang bisa diberlakukan di Indonesia sebab masih mempertahankan supermasi keunggulan masing-masing. Namun dalam ilmu-ilmu duniawi seperti; politik, ekonomi, komputer, pendidikan Islam sulit mengejar ketertinggalan apalagi kemajuan demi kemajuan selalu ditemukan setiap hari.

Realitas dialami pendidikan Islam melahirkan posisi pendidikan Islam termarginalkan dalam sistem pendidikan nasional meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional tetapi sistem pendidikan yang islamis kurang diakomodir secara proporsional baik dilihat dari sisi historis pendidikan di Indonesia maupun peserta didik yang menjadi tujuan utama terselenggaranya pendidikan. Padahal letak keunggulan pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang diikuti oleh peserta didik secara ketat dengan mata pelajaran yang cukup; seperti pelaksanaan proses belajar mengajar di pondok pesantren berlangsung pada waktu; pagi, siang, malam dan subuh. Dan mata pelajaran pun cukup banyak seperti; ilmu Qur'an dan tafsirnya, hadits dan ilmu dirayahnya, Bahasa Arab, Fikh, sejarah Islam dan sebagainya. Artinya secara substansial, pendidikan nasional sangat menjunjung tinggi nilai-nilai



ketuhanan (beriman dan bertakwa) dan berbudi pekerti luhur (akhlak) tetapi implementasinya dalam mata pelajaran yang mendukung pemahaman peserta didik untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tidak mungkin terwujud karena proporsi mata pelajaran pendidikan agama yang diberikan sangat kurang.

Secara umum, isi undang-undang tentang pendidikan nasional di Indonesia kurang memberikan proporsi lebih banyak tentang nilai-nilai Islam. Undang-undang No. 4 tahun 1950, Undang-undang No. 2 tahun 1989 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tidak menempatkan konsep pendidikan Islam sebagai konsep yang memberikan keseimbangan dalam melahirkan peserta didik yang mampu mempraktikkan agama dengan benar. Semua undang-undang tetap mengendepankan nilai-nilai kognitif dan psikomotor, sementara nilai-nilai afektif yang merupakan penentu derajat ketakwaan seseorang tidak mendapat porsi yang layak dalam sistem pendidikan nasional. Padahal domain afektif dapat diisi oleh pendidikan Islam yang nota bene memiliki mayoritas peserta didik sekaligus melestarikan budaya bangsa yang religius dan berakhlakul karimah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa aspirasi umat Islam untuk mendidikan putra putrinya sesuai konsep agamanya tetap tidak diakses secara proporsional oleh pemerintah meskipun sistem pendidikan nasional sudah mengalami perubahan selama tiga kali. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1945 yo undang-undang No. 4 tahun 1950 menyebut bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susula yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Undang-Undang ini menekankan pada pembentukan manusia yang memiliki moral yang tinggi bukan pada penguasaan materi. Lain halnya dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 lebih menekankan pada penguasaan materi keagamaan dan budi pekerti (Pasal 4) dan lebih jelas lagi pada pasal 11 dikatakan pendidikan keagamaan merupakan

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan, khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Kemudian dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 masih penekanan pada penguasaan materi dan budi pekerti (pasal 4) tetapi ada perubahan yang signifikan dengan adanya pasal yang memberikan jaminan peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12). Namun secara umum substansi undang-undang sistem pendidikan nasional masih sangat kecil akses pendidikan Islam sebab Islam hanya dipelajari dalam tataran teoritis dan ritualistik tanpa operasionalisasi secara nyata oleh peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan (beriman dan bertakwa) dan berbudi pekerti luhur (akhlak) tetapi implementasinya dalam mata pelajaran yang mendukung pemahaman peserta didik untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tidak mungkin terwujud karena proporsi mata pelajaran pendidikan agama yang diberikan sangat kurang.

Mengapa terjadi marginalisasi pendidikan Islam di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis mengkaji dan menganalisis berbagai akar persoalan seputar pendidikan di Indonesia. Menurut hemat penulis ada tiga unsur yang memicu marginalisasi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia yaitu; (1) tidak adanya konsep pendidikan Islam yang sudah teruji kesempurnaan dan keampuhan hasilnya yang digagas oleh tokoh-tokoh Islam berkaliber nasional di Indonesia, (2) rendahnya kepedulian para pejabat terhadap pendidikan Islam, dan (3) rendahnya minat masyarakat muslim untuk bersekolah di sekolah Islam. Akibat marginalisasi pendidikan Islam menimbulkan banyak persoalan, antara lain semakin meluasnya paham sekuler di kalangan masyarakat muslim, Implikasi marginalisasi pendidikan Islam di Indonesia tetap melahirkan permasalahan yang tidak kunjung selesai

seperti kelangkaan ulama dari pendidikan formal buatan pemerintah, meningkatnya praktek nilai-nilai sekulerisasi di kalangan generasi muda Islam. Mengetahui akan adanya kelangkaan ulama dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama, sang Menteri pun secara tidak sadar akan kebodohnya mengkritik dirinya sendiri yang tidak mampu lagi melahirkan ulama dari sistem pendidikan yang dilakukannya<sup>20</sup>. Menteri Agama pun tidak berdaya menghadapi *bargaining* politik pemerintah yang sedang berkuasa. Ia hanya mampu mengkritik tetapi tidak mampu merubah konsep apalagi ia tidak memiliki konsep maka kepentingan umat yang menjadi harapannya menjadi sia-sia. Salah satu pemicu dari timbulnya permasalahan tersebut antara lain karena kurangnya proporsional jam pelajaran pendidikan Islam yang diterima siswa di sekolah dibandingkan dengan pelajaran umum, termasuk siswa Madrasah Aliyah Negeri. Keadaan di atas mencerminkan betapa kecilnya kontribusi umat Islam yang mayoritas itu tentang konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, benar dikatakan Donald K. Emerson dikutip Kuntowijoyo bahwa umat Islam di Indonesia sebuah minoritas aktif kendatipun jumlahnya mayoritas dan mereka dibawah kendali pemerintah yang terpesona oleh pembangunan yang sekuler<sup>21</sup>. Sejalan dengan pandangan Kuntowijoyo bahwa generasi muda di Indonesia sudah cukup siap untuk berpartisipasi dalam pasaran kerja karena banyak alumni sekolah sudah cukup profesional di bidangnya seperti; bisnis, birokrasi dan pendidikan<sup>22</sup>. Disamping itu, banyak terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda pemudi muslim. Keadaan ini cukup memprihatinkan kalangan pendidik Islam khususnya karena dilihat materi pelajaran agama sudah diberikan dengan cukup tetapi tindakan mereka menyalahi aturan agama yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>21</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998); hal. 348.

<sup>22</sup>*Ibid.*

dipelajarinya. Adanya penyimpangan antara teori dan praktik menimbulkan kritikan tajam hasil pendidikan Islam, yang akhirnya para orang tua muslim tidak mau memasukkan anaknya ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini justru memperparah posisi pendidikan Islam yang sedang dibangun untuk dijadikan rujukan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang lebih baik dan diterima semua pihak.

Di sisi lain timbulnya marginisasi pendidikan Islam juga karena kurangnya perhatian dan kepedulian yang tinggi dari partai politik Islam dan pejabat Islam untuk memperjuangkan pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Mereka yang ada di puncak kekuasaan seperti para pejabat di Departemen Pendidikan Nasional atau menjadi anggota DPR khusus bidang pendidikan kurang memiliki konsep pendidikan Islam yang jelas dan ahli dalam bidang tersebut. Mereka kebanyakan orang sekuler yang menganggap agama itu sama saja. Seharusnya sebagai orang Islam dapat memainkan peran aktif mencerdaskan bangsanya untuk memberikan kontribusi nyata dalam memahami agama yang mereka anut melalui pemberian materi pendidikan Islam yang lebih banyak. Kenyataannya justru mereka sendiri yang tidak mempedulikan eksistensi konsep pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Menurut Arief Furqan, salah satu hambatan penerapan konsep pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional adalah penolakan oleh kalangan non-muslim dan orang Islam sendiri<sup>23</sup>. Hambatan dari kalangan non muslim dapat dipahami karena berbeda agama, budaya, konsep dan politik tetapi hambatan oleh orang Islam sendiri merupakan cerminan betapa lemahnya perjuangan dan *sense of belonging* terhadap agama yang dianutnya untuk dijadikan landasan pendidikan bagi

---

<sup>23</sup>Arif Furqan ketika mengadakan sosialisasi undang-undang sistem pendidikan nasional di STAIN Mataram, 10 Mei 2003, mengatakan bahwa hambatan pengesahan rencana undang-undang sisdiknas bukan saja dari non-muslim terutama kaum Katolik tetapi juga datang dari orang Islam sendiri yang tidak setuju dengan peserta didik mutlak diajar oleh guru seagama dengan peserta didik. Ia mengambil contoh, penolakan orang Islam untuk diajar oleh guru-guru Islam sama halnya menolak orang-orang Islam hendak sholat diimami oleh guru agama atau kyainya sendiri.

masyarakatnya sendiri. Contoh paling nyata, banyak pelajar wanita beragama Islam tidak disuruh memakai jilbab sesuai perintah agamanya padahal al-Qur'an sudah mewajibkannya.<sup>24</sup> Demikian juga pejabat beragama Islam yang kebetulan berada di Departemen pendidikan Nasional tidak berpikir demi umat dengan merancang konsep pendidikan Islam kemudian memperjuangkannya sebagai sistem pendidikan nasional.

### **Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Alternatif**

Seiring dengan berlangsungnya era industrialisasi maka pendidikan yang semula lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bersosialisasi di tengah masyarakat pertanian cenderung berubah ke arah mempersiapkan peserta didik siap terjun ke tengah masyarakat industri sebagaimana cita-cita pembangunan bangsa. Karena itu model sekolah yang tumbuh juga cenderung menjadikan pabrik atau perusahaan sebagai modelnya. Pola ini membawa implikasi terjadinya proses birokratisasi dan spesialisasi dalam dunia pendidikan. Namun yang lebih diutamakan dalam proses ini adalah adanya kemampuan memecahkan masalah sebab pendidikan lebih dipersiapkan terciptanya *global village* (desa global) dalam kehidupan sosial umat manusia. Kehidupan sehari-hari akan diwarnai dengan mudahnya komunikasi non fisik melalui pengaruh internet, HP sehingga arus pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan semakin beragam. Kondisi seperti ini, menurut Lester Kurtz dikutip Bambang Pranowo mengatakan bahwa kehidupan beragama menghadapi tantangan besar dalam tiga hal yaitu; terjadinya proses keragaman internal, diferensiasi struktural dan pergulatan dengan dua dilema dari modernisme yakni pluralisme kultural dan kritik ilmu pengetahuan<sup>25</sup>.

Semakin jauh suatu agama berkembang keluar lingkungan asalnya akan semakin beragam keagamaan tradisi keagamaan yang berkembang dalam agama tersebut. Selanjutnya

---

<sup>24</sup>Perintah memakai jilbab bagi seorang wanita muslimah terdapat dalam dua ayat yaitu; surat an-Nur:31 dan al-Ahzab:55.

<sup>25</sup>Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis...*, hal. 34.

keragaman tradisi keagamaan dapat menimbulkan keragaman pula dalam hal merespon perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Menyadari akan timbulnya pengaruh tiga unsur di atas, maka pendidikan Islam perlu direformulasi dalam rangka menyiapkan diri pada era milenium III. Menurut Bambang Pranowo<sup>26</sup>, lima unsur yang harus dilakukan yaitu; (1) agama yang disajikan dalam proses pendidikan haruslah agama yang lebih menekankan pada keshalehan aktual bukan keshalahan ritual semata, mengingat era ini akan diwarnai oleh “trust” juga kompetisi, (2) pendidikan harus mampu menyiapkan generasi terdidik yang pluralis yang siap mengatasi kemajemukan baik internal maupun eksternal, (3) pengembangan sifat pluralis harus merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, terbuka dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat, (4) masyarakat madani yang diharapkan adalah masyarakat yang penuh percaya diri, dan (5) pendidikan yang dilakukan harus menyiapkan generasi yang siap berpartisipasi aktif dalam interaksi global.

Dengan memahami bentuk tantangan yang dihadapi serta upaya yang harus dilakukan pendidikan Islam untuk eksis dan menjadi pendidikan alternatif senantiasa memperhatikan tuntutan global tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar dalam pendidikannya. Bagaimana pun pendidikan Islam memiliki kekuatan tersendiri yaitu pendidikan yang lahir dari masyarakat muslim sendiri dan kekuatan itu senantiasa menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan alternatif pada era milenium ketiga. Kekuatan itu seperti dikatakan Sarkawi Sayuthi yaitu; (1) sistem pendidikan Islam didirikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejewantahkan nilai-nilai Islam, dan (2) sistem pendidikan Islam mengajarkan ajaran Islam<sup>27</sup>.

Harapan pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatif di era milenium merupakan jawaban akan semakin butuhnya nilai-nilai agamis di tengah kehidupan global yang penuh

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 40.

<sup>27</sup>Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), hal.

dengan kehampaan nilai-nilai ketuhanan seseorang karena waktunya sepenuhnya pada pencarian rezeki duniawi yang semakin dominan. Sementara makna hidup semakin mereka rasapi sebagai suatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta, maka ketika itu pendidikan Islam menjadi kebutuhan pertama dan utama dalam mengatasi kehampaan spiritual di tengah masyarakat industri sekuler. Namun demikian, pendidikan Islam harus menyesuaikan diri dengan tuntutan global dengan mereposisi atau reformulasi kurikulum, metodologi, sumber belajar dan aplikasi nilai-nilai agama secara nyata dan berkelanjutan. Dengan cara ini, maka konsep pendidikan Islam dapat memberi sumbangan khusus kepada sistem pendidikan nasional yang bisa dipadukan secara sinergis dan terpadu sehingga melahirkan sistem pendidikan nasional yang betul-betul menjawab kebutuhan manusia Indonesia baik jasmani maupun rohani secara seimbang.

Disamping itu, pendidikan Islam ke depan harus mampu menampilkan sosok yang santun, cerdas dan berorientasi *rahmatan lil alamin*. Bukan ditampilkan secara vulgar, anarkis, deskruktif, dan diskriminatif. Karena itu dalam pandangan A. Qadri Azizy<sup>28</sup> Islam yang bisa diterima oleh lingkungannya adalah manusia muslim yang senantiasa berbuat baik untuk kepentingan dirinya, dan orang lain atau mu'amalah bayna al-nas (hubungan sesama manusia) atau nilai-nilai yang mempunyai implikasi sosial atau etika sosial. Menurutnya, ajaran Islam yang paling penting adalah terciptanya hubungan sesama manusia yang sarat dengan nilai-nilai berkaitan moralitas sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta menghargai pluralisme di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bangsa-bangsa lain.

---

<sup>28</sup>A. Qadri Azizy, *Pendidikan...*, hal. 22.

### C. PENUTUP

Pendidikan Islam seharusnya diajarkan kepada peserta didik dengan materi dan jam pelajaran yang cukup untuk memahami agama mereka dengan baik, bukan diajarkan secara parsial dan lateral seperti dilakukan pemerintah Indonesia khususnya pada Departemen Pendidikan Nasional dengan mengajarkan Islam dalam satu paket dengan jam pelajaran relatif kecil tidak sebanding dengan banyak materi. Departemen Pendidikan Nasional ikut bertanggung jawab dengan pemberian materi pendidikan agama Islam yang minus, parsial dan lateral kepada semua peserta didik pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan yang diasuhnya. Materi pendidikan Islam yang diterima peserta didik sangat tidak cukup untuk memahami agama mereka (Islam) dengan baik. Pendidikan Nasional sebagai sebuah grand system pendidikan di negeri ini seharusnya sudah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk karakter bangsa (*the national character building*) yang baik dan terhindar dari praktek KKN. Namun kenyataannya sistem pendidikan nasional melahirkan karakter bangsa yang kurang bermoral dan menyuburkan praktek KKN. Ini berarti sistem pendidikan nasional perlu diriview dan dirombak total lagi sebab ada warisan luhur budaya bangsa yang sengaja dieliminir oleh sekelompok orang atau golongan yaitu budaya pendidikan Islam berbasis pondok pesantren yang tidak pernah diakomodir dan dilegalisir secara nasional sebagai grand system pendidikan nasional dan bukan menempatkan pendidikan Islam sebagai sub system pendidikan yang berlaku sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qadri, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidika Anak Sukses Masa Depan Pandai dan Bermanfaat)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).
- Fadjar, Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998)
- Jabali, Fuad dan Jamhari (Penyunting), *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2002)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998)
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999)
- Rahardjo, Mudjia, (editor), *Qua Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pengetahuan* (Malang: Cendekia Paramulya, 2000)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998)
- Suprayogo, Imam, *Reformulasi Visi Pendidikan Islam* (Malang: STAIN Press, 1999)
- Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional Senantiasa Jadi Kelinci Percobaan*, NTB Post, 30 September 2003.
- Tilaar, H.A.R., *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Rosdakarya, 1999).
- Undang-Undang No. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).

